

PERAN BAHASA IBU DALAM MEMBANGUN KEBUDAYAAN DAERAH^{*)}

Oleh: Mahsun ^{**)}
Yayasan Abdi Insani

1. Pendahuluan

Ahli bahasa atau linguist mungkin akan merasa sangat puas tatkala menganalisis bahasa sebagai suatu sistem, di mana fungsi variabel-variabel linguistik tergantung pada gejala-gejala linguistik lain, sehingga dia tidak perlu mencari penjelasan yang berada di luar bahasa untuk menyelesaikan masalah kebahasaan. Namun demikian, amatlah penting untuk disadari bahwa bahasa digunakan oleh manusia yang mejadi anggota masyarakat tertentu, yang masing-masing memiliki kebudayaan yang khas. Ada kecenderungan bahwa para individu berbeda-beda dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, Variabel-variabel sosial seperti kelas dan status orang yang berbicara juga mempengaruhi caranya menggunakan bahasa. Selain itu, orang memilih menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan sesuatu yang berarti, dan apa yang berarti dalam kebudayaan yang satu dapat berbeda dengan apa yang berarti dalam kebudayaan yang lain. Dalam kenyataannya, cara kita menggunakan bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan kita.

Berdasarkan pengalamannya dalam menganalisis bahasa Indian Hopi, Edwar Sapir bersama muridnya Benyamin Lee Whorf mengembangkan suatu teori, yang terkenal dengan sebutan *Sapir-Whorf Hypothesis*. Menurut teori ini, bahwa bahasa bukan sekadar cara memberi kode untuk proses menyuarkan gagasan dan kebutuhan manusia, tetapi lebih merupakan suatu pengaruh pembentuk yang melalui penyediaan galur-galur ungkapan yang mapan, yang menyebabkan orang melihat dunia dengan cara-cara tertentu, mengarahkan pikiran dan perilaku manusia. Dengan demikian, tak dapat disangkal lagi bahwa bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sekaligus menjadi wadah serta pembentuk kebudayaan itu sendiri.

Sehubungan itu, tulisan ini akan memfokuskan diri pada pemaparan ihwal peran basa ibu dalam membangun kebudayaan daerah.

^{*)} Makalah yang disajikan dalam Musakarah Reaq Adat Tanaq Samawa, pada tanggal 25-26 Oktober 2001, di Dalam Loka, Kabupaten Sumbawa.

^{**)} Staf Pengajar Pada FKIP Unram dan Dosen Tamu pada program S2 dan S3 Linguistik Univ. Udayana, Denpasar.

2. Bahasa Ibu dan Pembangunan Kebudayaan Daerah

Konsep kebudayaan daerah sering dipertentangkan dengan kebudayaan nasional. Namun, dengan tidak melibatkan diri dalam diskusi tentang kedua konsep kebudayaan yang dalam tatanan berbangsa dan bernegara sering dipertentangkan tersebut, karena yang satu menafikan keberadaan yang lain, maka konsep kebudayaan daerah dalam tulisan ini mengacu pada kebudayaan yang terdapat pada sukubangsa-sukubangsa dalam suatu negara. Dengan kata lain, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang dimiliki oleh sukubangsa-sukubangsa yang tersebar di seluruh wilayah RI, seperti kebudayaan Jawa, Bali, Sasak, Samawa, Mbojo, Sunda, Bugis dll.

Adapun kebudayaan itu sendiri merupakan seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang kalau dilaksanakan oleh para anggotanya, melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat tersebut (Haviland, 1999: 333). Dengan demikian, kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada di balik, dan yang tercermin dalam perilaku manusia. Semua itu merupakan milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di dalam masyarakat. Persoalannya mengapa kebudayaan itu harus ada? Orang memelihara kebudayaan untuk menangani masalah dan persoalan yang dihadapi. Agar lestari, kebudayaan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari orang-orang yang hidup menurut peraturan-peraturannya, harus memelihara kelangsungan hidupnya sendiri, dan mengatur agar anggota masyarakat dapat hidup secara teratur. Dalam hal ini, kebudayaan harus menemukan keseimbangan antara kepentingan pribadi masing-masing orang dan kebutuhan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Karena itu pula, kebudayaan harus memiliki kemampuan untuk berubah agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru atau mengubah persepsinya tentang keadaan yang ada. Persoalannya, bagaimanakan kebudayaan (daerah) itu dibangun melalui bahasa ibu ? Dengan kata lain, bagaimana bahasa ibu itu berperan dalam membangun kebudayaan daerah ?

White (dalam Haviland, 1999) berpendapat bahwa semua perilaku manusia dimulai dengan penggunaan lambang. Seni, agama, dan uang, misalnya melibatkan pemakaian lambang. Kita dapat memahami semangat dan ketaatan yang dapat

dibangkitkan oleh agama bagi yang mempercayainya. Sebuah salib, gambar atau benda pujaan yang manapun dapat mengingatkan penganutnya pada penganiayaan atau perjuangan yang berabad-abad lamanya atau dapat menjadi pengganti sebuah filsafat atau kepercayaan yang lengkap. Dalam pada itu, aspek simbolis yang terpenting dari kebudayaan adalah bahasa, pengganti objek dengan kata-kata. Salthe (1972:402) menegaskan bahwa bahasa simbolis adalah fundamen tempat kebudayaan manusia dibangun. Pranata-pranata kebudayaan, seperti struktur politik, agama, kesenian, organisasai ekonomi tidak mungkin ada tanpa lambang-lambang. Dengan menggunakan bahasa, seperti didefinisikan Edwar Sapir (1949:8) sebagai metode yang murni manusiawi untuk menyampaikan gagasan, emosi, dan keinginan dengan menggunakan sistem lambang yang diciptakan secara sukarela, manusia dapat meneruskan kebudayaan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Dengan kata lain kebudayaan dipelajari dan diwariskan melalui sarana bahasa, bukan diwariskan secara biologis.

Dalam pada itu, bahasa khususnya, bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya atau yang sering disebut dengan konsep bahasa ibu (*native language* atau *mother language*) periksa Kridalaksana (1993: 22-23), diperoleh secara intuitif. Dengan demikian, maka dalam pemerolehan kebudayaan setempat oleh seorang anak manusia yang menjadi anggota masyarakat di tempat itu berlangsung pula secara intuitif dan simultan tatkala mereka mempelajari bahasa ibunya. Melalui galur-galur ungkapan yang mapan, sistem gramatika dan leksikon yang tersedia dalam bahasa ibu, seorang anak manusia yang menjadi anggota masyarakat telah dibentuk cara pandang, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat bahasa dan budaya setempat. Sebagai contoh, melalui proses pemerolehan unsur-unsur kebahasaan yang berupa unsur leksikon dan atau kaidah gramatika tentang sistem pembentukan konsep waktu dalam bahasa Samawa, secara simultan pula telah tertanam cara pandang pada diri anggota komunitas sukubangsa Samawa tentang konsep keberadaan dirinya dalam dimensi waktu yang berorientasi pada masa kini yang lebih dekat dengan masa lampau dan masa mendatang. Selanjutnya orientasi budaya ini telah melahirkan perilaku komunal sukubangsa ini di antaranya berupa perilaku yang kurang menghargai sejarah, cenderung kurang mau belajar dari pengalaman terdahulu, percaya diri, kurang semangat kolektif yang dibarengi semangat individual yang relatif tinggi dll. (periksa Mahsun, 2000 dan 1995). Begitu pula, melalui pemerolehan pengetahuan

tentang pembentukan konstruksi ajektival, sifat, atau keadaan dalam bahasa samawa yang salah satu unsurnya mengandung unsur kata *ate*, seperti pada konstruksi: *balong ate* ‘baik hati’, *lenge ate* ‘iri, dengki’, *beang ate* ‘memberi hati’, *ete ate* ‘mengambil hati’, *sakit ate* ‘sakit hati’, *tingi ate* ‘sombong, tinggi hati’, *ate taleko* ‘hati nurani’, *rasate* (<*rasa* + *ate*) ‘keinginan’, *suate* ‘dendam, kecewa’, *roa ate* ‘tega’, *noroa ate* ‘tidak tega’, *nda ling ate* ‘tidak berkeinginan, cuek’, *nyaman ate* ‘tentram, damai’, *olo ate* ‘berharap, jatuh hati’, *talo ate* ‘merasa kalah’, *rarate* (<*rara* + *ate*) ‘miskin, tidak tentram/ damai’, anak manusia Samawa, secara intuitif, telah diintrodusir tentang nilai hidup yang menempatkan masalah hati nurani sebagai parameter dalam mengarahkan derap langkah kehidupan. Hati nurani pula yang menjadi ukuran tercapainya tujuan kehidupan, bahkan hati diidentikkan dengan diri manusia itu sendiri, seperti terungkap dalam Lawas:

Pati pelajar we ate

Na mupina boat lenge

Pola tuling desa tau

Ate pada **Lawas** di atas dipersonifikasikan sebagai diri manusia, karena yang menerima pelajaran hanyalah manusia, dan diri manusia pada konstruksi “*Pati pelajar we ate*” diidentikkan dengan *ate* ‘hati’ itu sendiri.

Selain itu, hati nurani dijadikan sandaran dalam pergaulan dengan siapa saja, seperti dalam Lawas:

Mana tau barang kayuq

Lamin to sanyaman ate

Yanan si sanak parana

Siapa saja harus diperlakukan sama, dengan tanpa memandang keturunan siapa orang itu, dari mana asalnya, dan apa tingkat pendidikannya. Yang penting kehadiran diri orang itu dapat membawa ketentraman hati. Ketentraman hati yang dapat dimunculkan oleh kehadiran diri individu yang lain, maka diri yang lain itu akan dipandang sebagai sanak keluarga. Pandangan semacam inilah yang telah mampu melahirkan menejemen konflik **Kamutar** (<**kaN-** + **putar** > **kamutar** ‘keadaan berputar, silih berganti’) dalam tatanan masyarakat pluralis Kesultanan Sumbawa. Rasanya agak sulit, jika dalam suatu masyarakat multikultural yang terpilah secara vertikal-kekuasaan atas segmen sosial kedatuan Jereweh, Taliwang, Seran, serta terpilah secara horizontal-etnisitas atas segmen Samawa, Banjar, Bugis, Arab, Selayar, Bajo, Jawa dll. dapat hidup harmonis melalui

menejemen konflik Kamutar, tanpa disertai oleh pandangan kultural yang menganggap semua manusia itu sama, sederajat, yang apabila berdiri akan sama tinggi dan bila duduk akan sama-sama rendah. Lebih jauh dari itu, hati nurani dijadikan sandaran dalam memunculkan semangat optimisme bagi pencapaian sesuatu yang apabila dipandang secara kasat mata sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk direngkuh dan dijangkau, seperti terungkap dalam Lawas:

Tingi paruak desa ta

Kutulang mara aiq let

Bawar asar ling rasate

Konsep *ate* pada konstruksi *rasate* dalam keseluruhan konstruksi Lawas di atas mengesankan **aku** (lirik: Lawas) merasa optimis untuk mencapai sesuatu yang secara kasat mata tidak mungkin dapat dicapai, karena terjal, berliku-liku, banyak turun naiknya/ tidak rata, banyak tantangan. Namun, jika apa yang dicita-citakan itu memang sudah menjadi hasrat hati (keinginan= *rasate*) dengan mudah dapat mengubah tantangan menjadi harapan. Meskipun Lawas ini digunakan pada ranah (domein) perkawinan (khususnya sorong serah), namun konsep ini dapat menjadi ukuran pada semua ranah kehidupan yang terkait dengan pencapaian suatu maksud atau cita-cita. Itu sebabnya, jika sesuatu itu sudah menjadi hasrat hati, maka akan muncul sikap “pantang menyerah sebelum bertanding” pada diri manusia Samawa.

Pemerolehan nilai-nilai budaya melalui proses pemerolehan bahasa Ibu tidak hanya terjadi dalam komunitas Samawa. Dalam komunitas lain pun terjadi hal yang serupa, selama komunitas itu memiliki sarana komunikasi yang disebut bahasa. Dalam komunitas Mbojo, misalnya perilaku yang mencerminkan mobilitas ruang yang tinggi, dalam arti keberadaan manusia Mbojo sangat ditentukan oleh kemampuan mengisi semua penjuru ruang, seperti tampak pada perilaku masyarakat petani tradisional yang suka melakukan perladangan berpindah-pindah, penekanan pada pelaksanaan aktivitas bukan pada upaya intensifikasi tetapi lebih pada upaya ekstensifikasi, berjiwa perantau pada hakikatnya telah diperoleh manusia Mbojo tatkala mereka mulai memperoleh unsur leksikon yang menunjuk pada dimensi ruang.

Dalam bahasa Mbojo ditemukan pemakaian preposisi yang ditentukan oleh letak arah mata angin, letak pegunungan, letak daratan, dan letak aliran air (sungai atau laut). Bentuk-bentuk yang menunjukkan arah atau letak (tempat) tersebut adalah: *da* ‘utara’, *do*

‘selatan’, *di* ‘barat’, *ele* ‘timur’, *ese* ‘atas’, *awa* ‘bawah’, *dei* ‘dalam’, *ari* ‘luar’, dan *ipa* ‘seberang

Semua kata di atas merupakan kata yang dapat dikategorikan sebagai kelas kata benda. Empat kata yang pertama digolongkan nomina nama geografis (arah mata angin); sedangkan sisanya adalah kata benda yang menyatakan tempat atau nomina lokatif. Kata-kata tersebut dalam konteks tertentu dapat menjadi kata penunjuk arah, tempat; dalam hal ini berperan sebagai preposisi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kalimat berikut ini.

- a. *Maita doho tando ele.* ‘Mari kita duduk menghadap timur’
- b. *Satoi poda mpa malampa lao di.* ‘Sedikit sekali orang yang menuju barat’
- c. *Nawaura hompa adeku barai lao di lao rakaku ama Bedo, rai lao da lao rakaku ama Gejo, rai lao do lao rakaku ama Barewo.*

‘Saya sangat lelah berlari menuju barat, utara, dan selatan menemui Pak Bedo, Pak Gejo, dan Pak Barewo’

- d. *Ta lao biaku roa ede awa ketere butu.* ‘Mari kita pecahkan periuk itu di teras’
- e. *Nahu neqe lao ese Sape.* ‘Saya akan pergi ke Sape’
- f. *La Hami maru do mai ba kadera.* ‘Si Hami tidur di sebelah kursi’
- g. *Nahu bou poku ele nggaro.* ‘Saya baru tiba dari kebun’
- h. *Ipa sori ede wara dou mancao.* ‘Di seberang sungai ada (orang) berkelahi’

Yang menarik dari data di atas adalah penggunaan nomina geografis dan nama tempat sebagai preposisi, yang sepadan dengan preposisi *ta* ‘ke’, *di* ‘di’, dan *ra* ‘dari’ seperti dalam kalimat berikut ini:

1. *Mada neqe lao ta aka.* ‘Saya mau pergi ke sana’
2. *Weha japum buku di wawo meja !* ‘Tolong ambilkan buku di atas meja’
3. *Sia ra maina ari Mbojo.* ‘Dia datang dari Bima’
4. *Ari Kolo wara sarae bura ‘ Di Kolo ada pasir putih’*
5. *Nami malao ese Mbojo.* ‘Kami pergi ke Bima’
6. *Sia lao awa Sumbawa.* ‘Dia pergi ke Sumbawa’
7. *Sia Lao ipa sila.* ‘Dia pergi ke Sila’
8. *Sia lao dei Calabai.* ‘Dia pergi ke Calabai’
9. *Sia lao da Makassar.* ‘Dia pergi ke Makassar’

Penggunaan kata yang berkategori nomina geografis dan nomina lokatif *ari* ‘luar’, *ese* ‘atas’, *awa* ‘bawah’, *ipa* ‘seberang’, dan *da* ‘utara’ yang sepadan dengan kata yang memang secara kategorial adalah preposisi (sepadan dengan preposisi *ta* ‘ke’) ditentukan oleh konteks ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, maknanya ditentukan oleh situasi geografis di mana si pemakai bahasa berada pada saat berlangsungnya tuturan; atau disebut pula sebagai kata yang bermakna kontekstual (periksa Kridalaksana, 1993). Secara konseptual penggunaan kata tersebut sebagai kata penunjuk arah, tempat, atau sebagai preposisi dapat dirumuskan dalam bentuk kaidah sebagai berikut.

- a. Pemakaian kata *ari* ‘luar’ sebagai preposisi menunjukkan letak tempat yang berada pada bagian luar batas daerah, keluar dari daerah/ desa/ kota atau jauh dari desa/ kota; atau dibatasi oleh gunung/ pegunungan, sungai atau laut;
- b. pemakaian kata *ese* ‘atas atau tinggi’ menunjukkan tempat atau letak daerah yang berada pada dataran tinggi, ditempuh atau dicapai dengan mendaki (jika melewati gunung);
- c. kata *awa* ‘bawah atau rendah’ digunakan untuk menunjukkan bahwa letak tempat berada pada dataran rendah, dicapai dengan jalan menuruni gunung atau menyusuri lembah;
- d. kata *ipa* ‘seberang’ digunakan untuk menunjukkan letak tempat yang dituju berada pada bagian seberang yang dibatasi oleh aliran air, sungai, laut, sawah, dan padang yang luas;
- e. pemakaian kata *dei* ‘dalam’ menunjukkan letak tempat yang dituju berada di pedalaman yang dibatasi oleh pegunungan atau dikelilingi oleh pegunungan, dicapai dengan jalan memutar, mendaki dan menuruni gunung; dan
- f. pemakaian kata penunjuk arah mata angin sepereti *da* ‘utara’, *do* ‘selatan’ *di* ‘barat’, dan *ele* ‘timur’ jika daerah yang dituju berada di sebelah arah mata angin tertentu, dalam hal ini, untuk kalimat (9) letak kota yang dituju berada di utara. Penggunaan kata penunjuk arah mata angin tidak memiliki syarat pembatas seperti sawah, sungai, gunung dll.

Munculnya berbagai terminologi yang menunjuk ruang yang begitu komprehensif dalam bahasa Mbojo dan sekaligus sebagai kata yang menjadi penanda lokatif atau arah. Kondisi ini merupakan suatu kekhasan dalam bahasa Mbojo, yang tidak dimiliki oleh bahasa lain yang sekeluarga dengan bahasa tersebut. Umumnya, kata penunjuk arah dalam berbagai bahasa rumpun Austronesia, hanya mengikuti aliran air, sehingga dikenal istilah *hulu* dan *hilir* dalam bahasa Melayu, *kulon* (< *ka-* + *ulu* + *-an*) dan *kilen* (bentuk halus < *ka-* + *hilir* + *-an*), yang kedua-duanya berarti ‘barat’ dalam bahasa Jawa, di samping bentuk: *lor* ‘utara’, *kidul* ‘selatan’, *wetan* ‘timur’; *bao* dan *bawaq* dalam bahasa Sumbawa. Meskipun bahasa Sasak menunjukkan adanya kata penunjuk arah atas empat jenis, yaitu *lauq*, *daye*, *bat*, dan *timuq*; atau bahasa Jawa menunjukkan ada empat kata untuk itu, namun jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dimiliki bahasa Mbojo. Itupun dua dari empat terminologi penunjuk tempat atau arah dalam bahasa Sasak tersebut merupakan pinjaman dari bahasa Melayu, yaitu kata *bat* yang berasal dari kata *barat* dan *timuq* yang berasal dari kata *timur*; sedangkan kata *daye* ‘ke arah gunung’ dan *lauq* ‘ke arah laut’ merupakan kata asli bahasa Sasak. Dikatakan demikian, karena rupanya konsonan /r/ pada fase historis tertentu dalam bahasa Sasak mengalami pelesapan (*deletion*), sehingga kaidah terbentuknya kata tersebut adalah sebagai berikut: *barat* menjadi **baat* (pelesapan konsonan /r/), kemudian menjadi *bat* (karena bahasa Sasak tidak mengenal vokal panjang); sedangkan kata *timuq* terbentuk dari kata *timur*, menjadi **timu* (pelesapan konsonan /r/, dan terjadi proses penambahan konsonan glotal pada posisi akhir, dan kaidah ini merupakan ciri bahasa Austronesia Barat periksa Mbetse, 1990 dan Mahsun 1994, seperti kata: *tua* menjadi *toaq* ‘tua’, *mudah* menjadi *mudaq* ‘mudah’ dll.). Adapun kedua kata yang merupakan unsur asli bahasa Sasak tersebut masing-masing ada hubungannya dengan aliran air, yaitu gunung sepadan dengan makna arah sumber aliran air (*daye*) dan arah tujuan aliran air (*lauq*) (periksa Mahsun dkk., 2001). Hal yang sama terjadi pula pada kata *kulon* dan *kilen* dalam bahasa Jawa, yang juga berasal dari bahasa Melayu, yang keduanya berbeda maknanya dalam bahasa asal, tetapi dalam bahasa Jawa dipinjam untuk makna yang sama, yaitu ‘barat’, dengan perbedaan pada dimensi halus dan nonhalus.

Selain itu, yang cukup menarik adalah apabila hal ini dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan Sapir-Whorff, maka munculnya preposisi bahasa Mbojo yang memanfaatkan terminologi yang menyatakan nomina lokatif atau arah, tidak lepas dari

cara komunitas, penutur bahasa ini, dalam mempersepsikan keberadaannya dalam dimensi ruang. Seluruh kemungkinan dimensi ruang (penjuru tempat) selalu memiliki unsur penanda kebahasaannya. Dengan kata lain, hadirnya berbagai terminologi yang berhubungan dengan dimensi ruang yang sangat komprehensif dalam bahasa Mbojo erat kaitannya dengan perilaku budaya masyarakat pemiliknya sebagai komunitas yang memiliki mobiltas yang sangat tinggi. Yaitu komunitas yang memiliki kebiasaan berpindah-pindah dari satu penjuru ke penjuru lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dari desa ke kota, dari pedalaman menuju perkotaan, dari dataran tinggi ke dataran rendah, dari dalam ke luar, dari arah timur ke arah barat, utara, selatan dan sebagainya. Perilaku ini masih tampak dalam tatanan kehidupan komunitas Mbojo sekarang ini.

3. Catatan Penutup

Adanya kesejajaran antara perilaku verbal dengan nonverbal baik pada komunitas Samawa maupun komunitas Mbojo tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang muncul secara kebetulan, karena sesuatu yang secara kebetulan hanya akan ditemukan sebagai suatu yang ideosinkratis (kasuistis), bukan sesuatu yang nomotetik, yang dapat ditemukan pada komunitas lain. Dalam pada itu, tampaklah bagaimana bahasa ibu telah berperan sebagai sarana membentuk dan mewarisi kebudayaan dalam suatu komunitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui pemerolehan bahasa ibu, anak manusia dalam komunitas yang menggunakan bahasa tersebut, tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan secara gramatikal dan berterima (*grammaticality* dan *acceptability*), tetapi sekaligus anak manusia tersebut memperoleh tentang budaya komunitas penutur bahasa ibu tersebut.

Mengingat urgensi peran bahasa ibu, selain sebagai sarana komunikasi internal tetapi juga sebagai medium pembangunan, pengembangan, dan pewarisan budaya komunitas pemilik bahasa tersebut pada setiap anggota komunitasnya; serta memperhatikan usia kelas-kelas permulaan pada tingkat pendidikan dasar (kelas I-III SD/MI) sebagai usia masih subur dalam pemerolehan bahasa (termasuk bahasa ibu), maka sebaiknya penggunaan bahasa pengantar dalam pendidikan pada jenjang tersebut menggunakan bahasa ibu.

Dalam hubungan dengan penggunaan bahasa ibu (daerah) sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan, dapat dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Freeman dan Freeman (1992) yang menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua (bahasa Inggris) sering mengalami kesulitan dalam belajar mata pelajaran lain, seperti matematika, IPA, IPS dan sejenisnya. Namun sebaliknya, siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua (periksa pula Cummins, 1989).

Selain alasan di atas, pemberian pelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa ibu pada tingkat permulaan dapat menjadi sarana bagi pembentukan sikap percaya diri pada peserta didik. Mereka merasa dihargai, karena bahasa yang mereka gunakan yang sekaligus menjadi sarana sosialisasi budaya yang membentuk diri mereka digunakan sebagai sarana dalam penyampaian pengetahuan di sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Dalam pada itu, secara psikologis mereka merasa aman berada di sekolah dan akan selalu siap untuk menerima pelajaran. Dapat dibayangkan, apa yang terjadi jika pelajaran tertentu disampaikan dalam bahasa kedua yang belum dikuasai peserta didik. Selain mereka harus berjuang untuk memahami materi pelajaran juga dalam waktu yang bersamaan mereka harus mengerahkan segala potensinya untuk memahami bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi pelajaran tersebut. Rasa putus asa dapat saja membayangi peserta didik, yang karena itu pula dapat memunculkan rasa kurang percaya diri. Mungkin itu salah satu sebab mengapa nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam pelajaran agama, atau PPKN di sekolah-sekolah misalnya, belum sepenuhnya dapat diaplikasikan peserta didik dalam kehidupan nyata, karena sesungguhnya mereka hanya memahami konsep itu secara verbal bukan secara substansial.

Alasan lain sehubungan dengan penggunaan bahasa ibu (daerah) sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar adalah berkait dengan pembinaan dan pengembangan bahasa itu sendiri. Mu'adz (1998) menyebutkan bahwa dengan digunakannya bahasa ibu (daerah) sebagai bahasa pengantar maka dimungkinkan bahasa daerah itu terhindar dari kepunahan. Berbagai kosa kata yang berhubungan dengan konsep-konsep dan terminologi dalam bahasa asing akan teradopsi ke dalam bahasa daerah dan sekaligus akan memperkaya kosa kata dalam bahasa daerah itu sendiri.

Dicontohkannya, kata-kata dalam bahasa Sasak: *haram, halal, subhat, nikmat, nyalat jenasah, talak sekeq* dll. merupakan terminologi yang diadopsi dari bahasa arab bersamaan dengan upaya penutur mempelajari agama Islam. Dengan demikian, bahasa ibu (daerah) itu akan menjadi fleksibel, dapat mengkomunikasikan ide-ide dalam diri penuturnya dan karena itu tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh penuturnya.

Selain penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, juga bahasa ibu perlu diajarkan pada sekolah-sekolah, baik dari tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Pengajaran bahasa ibu pada tingkat dasar dimaksudkan sebagai upaya pemantapan pengetahuan kebahasaan melalui proses pembelajaran, sehingga siswa memperoleh ketrampilan penggunaan bahasa secara gramatikal dan berterima. Adapun pengajaran bahasa ibu (daerah) pada tingkat pendidikan menengah sampai perguruan tinggi, selain sebagai wahana pemantapan lebih lanjut penguasaan bahasa ibu (daerah) melalui proses pembelajaran, juga dimaksudkan sebagai upaya pengenalan akan dinamika makna kebhinnekatunggalikaan masyarakat Indonesia melalui pengajaran muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan, seperti yang dikembangkan Mahsun (1997- 2000) untuk bahasa Sasak.

Selain itu, pengajaran bahasa ibu (daerah) sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dapat dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, bahwa pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah (termasuk perguruan tinggi), akan semakin memberi legitimasi bagi upaya pemeliharaan bahasa daerah yang secara yuridis formal memang dijamin UDD 1945. Langkah ini akan menjadi salah satu tindakan (preventif) dalam upaya mencegah bahasa daerah dari ancaman kepunahan. Kedua, bahwa dengan dijadikannya bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, maka akan semakin menggairahkan peserta didik dalam belajar sejarah dan budaya lokal. Ketiga, bahwa dengan belajar bahasa daerah (tentunya dengan model pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan, seperti yang dikembangkan penulis melalui Proyek Riset Unggulan Terpadu V, sejak 1997/1998 sampai 1999/2000) akan dapat memberi pemahaman secara empirik akan makna keanekaragaman dalam ketunggalikaan sukubangsa-sukubangsa yang terdapat di Indonesia. Suatu pemahaman yang selama ini dapat dipandang sebagai pemahaman yang bersifat verbalistik atau semu,

yang dikondisikan secara indoktrinatif tanpa diberi kesempatan untuk memikirkan kebenarannya melalui uji-uji empirik.

Patut diingat bahwa dalam menyusun materi pengajaran haruslah dipertimbangkan latar belakang bahasa ibu peserta didik serta tingkat pendidikannya. Apabila peserta didiknya berlatar belakang bahasa ibu bahasa Indonesia, maka pengajaran bahasa daerah haruslah disasarkan pada upaya penguasaan ketrampilan berbahasa (secara praktis) secara baik dan benar sebagai prioritas utama, selanjutnya, apabila peserta didiknya berlatar belakang bahasa ibu bahasa daerah yang diajarkan, maka materi pengajaran hendaknya lebih diprioritaskan pada pengajaran dengan maksud meningkatkan pemahaman akan sejarah dan budaya yang terdapat dalam masyarakat penutur bahasa tersebut di samping materi yang berkaitan dengan ketrampilan berbahasa. Apa yang diungkapkan di atas, merupakan konsep penyusunan materi untuk tingkat dasar, sedangkan untuk tingkat lanjutan sampai perguruan tinggi, materi yang berkaitan dengan upaya menumbuhkan pemahaman akan sejarah, budaya, dan keanekaragaman dalam ketungglakaan hendaknya menjadi prioritas. Untuk pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan, persyaratan yang pertama-tama harus dipenuhi dalam adalah penyediaan bahan jadi pengajaran yang berupa bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat. Bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat yang dimaksud baik yang terdapat pada level satu bahasa, jadi, berupa bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di antara dialek-dialek bahasa yang diajarkan maupun bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat dalam level antarbahasa, khususnya, bentuk yang berkerabat anantara bahasa yang diajarkan dengan bahasa lain yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengannya. Hal ini berarti, bahwa dalam rangka pengembangan materi tersebut kajian yang pertama-tama dilakukan adalah kajian dialektologi diakronis dengan sasaran kajiannya adalah identifikasi dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa itu dan penentuan bentuk yang berkerabat melalui rekonstruksi bahasa purbanya (prabahasa). Kajian selanjutnya, adalah kajian historis komparatif dengan tujuan menentukan tingkat kekerabatan dan bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di antara bahasa yang akan diajarkan dengan bahasa lain yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dengannya melalui rekonstruksi bahasa purba (protobahasa) dari bahasa-bahasa tersebut. Berdasarkan hasil kerja di atas dilakukan penentuan bahasa standar melalui kajian secara sosiolinguistik. Hasil kajian secara sosiolinguistik ini selanjutnya dibawa ke dalam forum

musyawarah antarpemututur bahasa yang akan diajarkan itu untuk ditentukan secara formal dan atas dasar kesepakatan bersama tentang sosok dialek yang akan dijadikan kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan benar (bahasa standar). Setelah itu, penyusunan materi dapat dilakukan dengan tetap berpijak pada bahasa standar yang telah ditetapkan itu. Sebagai contoh, akan dipaparkan sebagian hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka uji coba model pengembangan materi pengajaran yang dimaksud, yang dilakukan penulis melalui Riset Unggulan Terpadu V, Dewan Riset Nasional, sejak tahun anggaran 1997/1998 s.d 1999/2000 terhadap bahasa Sasak.

Dari pelaksanaan riset tahun pertama 1997/1998 dengan menggunakan pendekatan dialektologi diakronis diperoleh gambaran bahwa bahasa Sasak terpilah ke dalam tiga dialek, yang secara linguistis ketiga dialek itu disebut dengan dialek a-a, a-e, dan e-e. Di antara ketiga dialek itu telah diidentifikasi beberapa pola bentuk bahasa yang berkerabat:

1. Kata berkerabat dengan konstruksi: a-a \cong a-e \cong e-e:

apa \cong ape \cong epe ‘apa’
mata \cong mate \cong mete ‘mata’
mama \cong mame \cong meme ‘laki-laki’ dll.

2. Kata berkerabat dengan konstruksi i/u-a \cong i/u-e:

lima \cong lime ‘lima’
(k ∂)tuma \cong (k ∂)tume ‘kutu badan’ dll.

3. Kata Berkerabat dengan konstruksi a-i/u \cong e-i/u \cong E-i/u:

ai(q,z) \cong eiq \cong Eiq ‘air’
ap(i, ∂)(c,z,r) \cong epi \cong Epi ‘api’
tali \cong teli \cong tEli ‘tali’
ak(u, ∂)(w,h) \cong eku \cong Eku ‘aku’ dll.

4. Kata berkerabat dengan konstruksi: i \cong e \cong ic \cong iz:

kiri \cong kire \cong kiric \cong kiriz ‘kiri’
gigi \cong gige \cong gigic \cong gigiz ‘gigi’ dll.

5. Kata berkerabat dengan konstruksi u \cong uw \cong ∂ w \cong uh \cong ue:

b(a,E, \hat{a})tu \cong batuw \cong bat ∂ w \cong batuh \cong batue ‘batu’
bulu \cong buluw \cong bul ∂ w \cong buluh \cong bulue ‘bulu’ dll.

6. Kata berkerabat dengan konstruksi $r \cong h$:

akar \cong akah 'akar'

ti(p,k)(a,∂)r \cong ti(p.r)ah 'tikar'

biwir \cong b(i,e)w(i,e)h 'bibir' dll.

7. Kata berkerabat dengan konstruksi $l \cong n$:

η∩mpal \cong η∩mpan 'mengapung'

t(o, ∩)k(o, ∩)l \cong t∩k∩n 'duduk'

t∂b∂l] \cong t∂b∂n 'tebal' dll.

8. Kata berkerabat dengan konstruksi $r \cong \emptyset$:

daraq \cong daq 'darah'

bar∂t \cong bat/ ba 'barat'

urat \cong uat 'urat'.

9. Kata berkerabat dengan konstruksi $d \cong r$:

b(E,i)d(∂,E)η \cong b(E,i)r(∂,E)η 'hitam'

pade \cong par(i, e,E) 'padi'.

Selanjutnya, pada tahun kedua dilakukan kajian sosiolinguistik untuk penentuan bahasa Sasak Standar. Kajian ini bertumpu pada upaya memperoleh keterangan para penutur dialek-dialek bahasa tersebut tentang masa lampau maupun masa kini dari dialek yang mereka gunakan, pandangan, aspirasi, dan sikap penutur dialek tersebut terhadap dialek yang digunakan atau terhadap dialek lainnya yang terdapat dalam bahasa itu. Dengan mengadopsi teori ranah dan metode analisis kuantitatif yang berupa analisis skala implikasional bagi pilihan bahasa (*implicational scale for language choice*) telah berhasil ditentukan bahwa salah satu di antara ketiga dialek itu lebih dimungkinkan untuk diangkat sebagai bahasa standar, karena domain tempat pemakaiannya lebih dominan dibandingkan dengan dua dialek lainnya. Dialek yang dimaksud adalah dialek a-e.

Hasil kajian secara sosiolinguistik ini selanjutnya di angkat dalam musyawarah penentuan bahasa Sasak Standar. Dari musyawarah tersebut telah diputuskan secara musyawarah dan mufakat bahwa dialek a-e dapat diterima sebagai bahasa standar.

Selanjutnya, untuk tahun ketiga (1999/2000) dilakukan penyusunan materi pelajaran bahasa Sasak yang berdimensi kebhinnekaan untuk siswa kelas I dan II SLTP. Materi disusun berdasarkan dialek bahasa Sasak standar dengan komposisi pembahasan

pada empat aspek: **kebahasaan, pemahaman, penggunaan, dan sastra**. Keempat aspek tersebut merupakan jabaran isi per unit, yang direncanakan terdiri dari sepuluh unit untuk satu paket (per jenjang atau kelas).

Untuk materi yang mengandung dimensi kebhinnekaan dititipkan pada pembahasan aspek **kebahasaan**, khususnya pada subtopik pembahasan **kosa kata**. Materi tersusun berupa teks bacaan dalam dialek bahasa Sasak Standar (dialek a-e) yang di dalamnya sengaja dimasukkan unsur-unsur leksikal yang memiliki relasi kekerabatan dengan unsur-unsur leksikal dialek-dialek lainnya.

Pada pembahasan subtopik kosa kata, unsur leksikal dialek standar yang memiliki relasi kekerabatan tersebut diangkat kembali untuk ditunjukkan padanannya dalam dialek-dialek bahasa Sasak lainnya. Pada saat itulah guru menjelaskan hakekat perbedaan dari unsur-unsur leksikal tersebut dengan mengaitkannya pada sebuah bentuk asal yang sama. Bersamaan dengan itu pula, pesan keanekaragaman dalam ketunggalikaan dapat disampaikan. Patut ditambahkan, bahwa penyusunan materi muatan lokal tersebut, untuk kelas I dan II, hanya akan memanfaatkan variasi kebahasaan yang terdapat dalam bahasa Sasak itu sendiri, jadi memanfaatkan variasi dialektal yang memiliki relasi kekerabatan. Selanjutnya, buku pelajaran yang telah tersusun itu diuji coba kelayakannya, baik yang menyangkut materi maupun kelayakan metode pengajarannya. Untuk itu, dilakukan pelatihan beberapa orang guru yang mewakili beberapa dialek yang ada dalam bahasa Sasak selama satu minggu. Selain itu, untuk mendukung proses belajar mengajar materi muatan lokal tersebut telah dikembangkan model simulasi, yang disebut simulasi kebhinnekaan. Dalam simulasi ini, di samping dimuat hal-hal yang berhubungan dengan masalah kebahasaan juga dimuat hal-hal yang berhubungan dengan letak geografis penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat tersebut, sehingga siswa selain belajar bahasa sekaligus belajar geografi.

Pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan memiliki arti penting bagi upaya meningkatkan kepribadian bangsa dan jati diri manusia Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman akan dinamika makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran akan keanekaragaman dalam kemajemukan budaya bangsa itu diharapkan semakin diyakini mengingat pemahaman itu diperoleh melalui pengetahuan empirik yang berupa evidensi kebahasaan, bukan dalam bentuk “indoktrinasi”.

Selain itu, materi muatan lokal tersebut dapat mencegah terbentuknya sikap primordial, sukuisme yang muncul sebagai akibat pemberian materi muatan lokal, yang nota bene berupa materi yang khas, sesuai kondisi daerah di mana materi itu disajikan, karena model ini di samping memperlihatkan kekhasan bahasa daerah yang diajarkan, juga memperlihatkan keterhubungannya dengan bahasa lain yang berkerabat dengannya. Pada lingkup bahasa yang diajarkan, model ini dapat menghilangkan kecemburuan penutur dialek lain dalam bahasa yang diajarkan itu, karena dialeknnya tidak diangkat sebagai dialek standar yang menjadi basis pengembangan materi pengajaran. Kecemburuan itu sangat dimungkinkan, karena pengangkatan dialek tertentu sebagai dialek standar berarti mengabaikan keberadaan dialek lain, yang dalam pada itu, secara psikologis, penuturnya merasa rendah dari penutur dialek standar. Hal itu lebih-lebih didukung oleh pemahaman terhadap konsep dialek, secara etimologis, lahir dari pemahaman tentang pengaitan ragam tertentu sebagai ragam yang kurang berprestise.

Kemudian, dengan dikembangkannya alat bantu pengajaran yang berupa simulasi kebhinnekaan dapat menjadi model bagi pengembangan metode pengajaran bahasa daerah lainnya, di samping dapat juga digunakan sebagai sarana justifikasi empiris bagi makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada skala yang lebih luas model yang dikembangkan pada level daerah itu dapat ditingkatkan menjadi model yang dapat berlaku pada lintas daerah, misalnya setelah peserta didik mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misal kelas III SLTP ke atas, dapat mengambil perbandingan pada lintas bahasa, bukan lagi lintas dialek dalam satu bahasa. Bahkan lebih jauh dari itu dapat dijadikan model untuk level nasional, dalam arti sistem pengajarannya yang bersifat kekerabatan-kontrastif tersebut dapat diambil pada bahan-bahan bahasa lain yang penuturnya lebih banyak dan memiliki tradisi tulis yang kuat, misalnya ketika mengajarkan materi muatan lokal bahasa Sasak di daerah yang berpenutur bahasa Sasak, bentuk yang berkerabat dapat dicarikan pada tingkat kekerabatan bahasa yang lebih tinggi misalnya, tingkat Austronesia Barat, seperti bahasa Bali, dan bahasa Jawa, karena bahasa Sasak, Bahasa Bali, dan bahasa Jawa merupakan bahasa-bahasa yang berkerabat pada level tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin banyak bahasa daerah lain yang diketahui berkerabat dengan bahasa daerahnya, dan dalam pada itu akan semakin luaslah pemahamannya akan makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan urgensi pelaksanaan Musakara Reaq Lembaga Adat Tanaq Samawa ini, kiranya sudah selayaknya dipertimbangkan untuk direkomendasikan hal-hal berikut ini:

1. Menjadikan bahasa ibu (bahasa Samawa) pada tingkat pendidikan dasar (kelas I-III SD) sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran; dan
2. Menjadikan bahasa ibu (bahasa Samawa) sebagai salah satu materi pengajaran muatan lokal pada semua jenjang pendidikan formal (SD sampai perguruan tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

- Cummins, J. 1989. *Empowering Minority Students Sacramento CAFE; The Sanitized Curriculum: Educational Disempowerment in a Nation at Risk*. In Richness in Writing: **Empowering ESL Students**. Ed. By D. Junction and D. Roen. Hal. 19-38. New York: Long Man
- Freeman, Yvonne S and Freeman, David E. 1992. *Whole Language for Second Language Learners*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Haviland, William A. 1999. *Antropologi*. Edisi Keempat, Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kridalaksana, Harimurti. 1999. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahsun. 1994. "Penelitian Dialek Geografis Bahasa Sumbawa". Yogyakarta: Disertasi Doktor UGM.
- Mahsun. 1995. "Konsep Kewaktuan dan Kemiskinan di Sumbawa: Suatu Kajian dari aspek Linguistik" dalam *Jurnal Aksara*, No. 9, Th. V, Juni 1995.
- Mahsun. 1997-2000. "Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebhinnekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Bahan pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat". Laporan Penelitian RUT V, Dewan Riset Nasional.
- Mahsun. 2000. "Bahasa dan Studi tentang Nilai-Nilai". Mataram: Makalah dalam Rangka Bulan Bahasa, yang diselenggarakan MLI Cabang Mataram pada tanggal 28 Oktober 2000, di FKIP Unram.
- Mahsun dkk. 2001. "Identifikasi Perilaku-Perilaku Komunal Masyarakat di Kabupaten Dompu dalam Rangka Implementasi Program Gema Prima". Dompu: laporan Penelitian Kerja sama Yayasan Abdi Insani dengan Bappeda Kabupaten Dompu.
- Mbete, Aron Meke. 1990. "Rekonstruksi Protobahasa Bali-Sasak-Sumbawa". Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia.
- Mu'adz, M. Husni. 1998. "Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar dan sebagai Mata Pelajaran dalam Sistem Pendidikan". Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VII, tanggal 26-30 Oktober 1998, di Jakarta.
- Salthe, Stanly N. 1972. *Evolutionary Biology*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sapir, Edward. 1949. *Language*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

